

## **BAB IV**

### **ALASAN PENGEMBANGAN PESAWAT SILUMAN J-20 DAN J-31 OLEH ANGKATAN UDARA TIONGKOK**

Kebijakan yang dirumuskan suatu negara tentu didasarkan atas alasan atau untuk memenuhi kepentingan tertentu. Bab ini membahas alasan Tiongkok untuk mengembangkan program J-XX yang menghasilkan pesawat siluman J-20 dan J-31, yaitu meningkatkan kekuatan nasional Tiongkok dan perimbangan kekuatan terhadap AS dan India yang dipandang oleh Tiongkok sebagai ancaman.

#### **A. Peningkatan Kekuatan Nasional Tiongkok**

##### **1. Peningkatan Kekuatan Ekonomi**

Tidak dipungkiri bahwa dewasa ini Tiongkok telah menjadi pusat perhatian dari seluruh dunia berkat kemajuan yang diperoleh dalam bidang ekonomi, politik, hingga pertahanan dan keamanan. Untuk menjelaskan berbagai keberhasilan yang dicapai Tiongkok, penting untuk membahas kembali kebangkitan Tiongkok sejak tahun 1980-an.

Setelah meninggalnya Mao Zedong, kekuasaan dipegang sementara oleh Hua Guofeng sebelumnya akhirnya diserahkan kepada Deng Xiaoping. Pada masa pemerintahannya, Deng berhasil mengubah Tiongkok yang terpuruk akibat mismanajemen yang dilakukan Mao Zedong menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Pertemuan Komite Pusat PKT yang diselenggarakan tepat sebelum pergantian tahun 1978/1979 mengesahkan perlunya PKT untuk berbenah dan memperbarui kinerjanya dalam menciptakan modernisasi Tiongkok. Kebijakan “*reform and opening-up*” Deng secara perlahan mengikis ajaran-ajaran komunisme yang teramat kental dan terlalu menitikberatkan aspek ideologis, namun secara bersamaan menerapkan nilai-nilai kapitalisme melalui pembukaan diri

terhadap pasar dan investasi asing. Guna meningkatkan arus ekspor dan impor barang dari dan menuju Tiongkok, pada Juli 1979 Tiongkok mengembangkan zona ekonomi khusus di sejumlah kota wilayah tenggara Tiongkok seperti Shenzhen, Zhuhai, Shantou dan Xiamen. Semenjak itu reformasi ekonomi terus digalakkan dari tingkat rumah tangga hingga perusahaan milik negara (People's Daily Online, 2019).

Berkat kebijakan ini, Tiongkok mengalami perkembangan pesat dengan hitungan waktu yang relatif singkat. Hal ini seperti diungkapkan presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim melalui sambutannya dalam pembukaan *China International Import Expo* pada November silam (Kim, 2018):

*“By embracing reforms and openness in its development model, China has increased its per capita income 25-fold, and more than 800 million Chinese people lifted themselves out of poverty as a result—more than 70 percent of the total poverty reduction in the world.”*

Pernyataan yang diberikan Yong Kim mencerminkan kondisi Tiongkok pada saat ini. Sejak tahun 1990 produk domestik bruto (PDB) Tiongkok selalu mengalami peningkatan, dengan PDB tahun lalu berada di angka USD 13,6 triliun.<sup>4</sup> Perlu diakui bahwa baru-baru ini ekonomi Tiongkok tengah mengalami perlambatan dengan angka pertumbuhan sebesar 6,2 persen, yang mana merupakan angka terendah dibandingkan pertumbuhan periode dua dekade terakhir (BBC, *China's economy grows at slowest pace since 1990s*, 2019). Walaupun begitu, pertumbuhan ekonomi

---

<sup>4</sup> Angka USD 13,6 triliun merupakan angka PDB secara nominal. Angka ini menjadikan Tiongkok sebagai negara dengan ekonomi terbesar ketiga setelah AS dan Uni Eropa. Namun apabila dilihat dari paritas daya beli (*purchasing power parity/PPP*), maka PDB Tiongkok menjadi USD 25,3 triliun, menjadikan Tiongkok sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia.

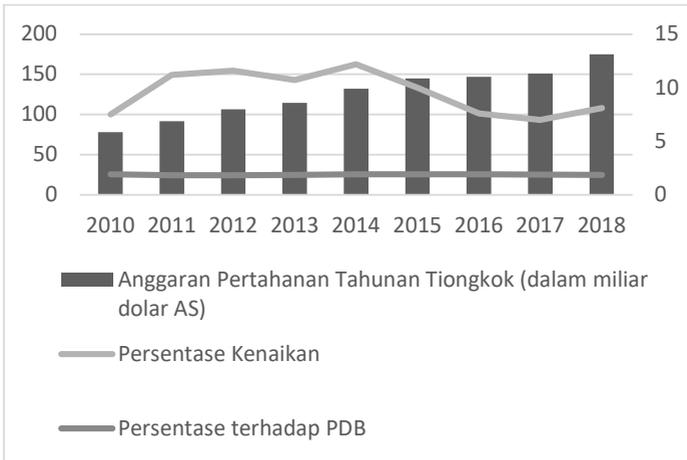
Tiongkok pada tahun-tahun sebelumnya sempat menjadi yang tercepat dibandingkan negara-negara lain di seluruh dunia.

## **2. Peningkatan Kekuatan Militer**

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok secara signifikan mendorong peningkatan di bidang lainnya, salah satunya militer. Berbicara tentang militer, ada tiga aspek yang dapat ditelusuri lebih jauh: anggaran, sistem persenjataan dan peralatan tempur, dan strategi atau kebijakan pertahanan.

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok berimplikasi pada anggaran pertahanan Tiongkok yang selalu meningkat tiap tahunnya. Untuk tahun ini Tiongkok mengalokasikan RMB 1,19 triliun (USD 177,61 miliar) untuk keperluan pertahanan (Johnson, 2019). Angka ini sedikit lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu RMB 1,11 triliun (USD 175 miliar) di tahun 2018 dan RMB 954 miliar (USD 146,67 miliar) di tahun 2016. Alokasi ini menjadikan Tiongkok sebagai negara dengan anggaran pertahanan terbesar setelah AS yang menempati peringkat pertama. Akan tetapi, dilihat secara persentase kenaikannya, anggaran pertahanan Tiongkok tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Persentasenya terhadap PDB relatif stagnan dengan besaran rata-rata mencapai 2 persen dari total PDB.

**Grafik 4.1 Peningkatan Anggaran Pertahanan Tiongkok 2010-2018**



Sumber: diolah dari berbagai sumber

Seperti diungkapkan peneliti Akademi PLA, Mayor Jenderal Chen Zhou, peningkatan anggaran pertahanan Tiongkok tidak semata-mata untuk keperluan modernisasi angkatan bersenjata, namun juga untuk mendukung reformasi angkatan bersenjata Tiongkok sekaligus meningkatkan taraf hidup bagi seluruh personel PLA (GlobalSecurity.org, 2019). Namun seberapa besar alokasi anggaran pertahanan Tiongkok pada masing-masing bidang tidak dijelaskan lebih lanjut. Terakhir kali Tiongkok memberikan detail pembagian anggaran masing-masing bidang bertepatan dengan publikasi Buku Putih Pertahanan Tiongkok 2010 (Cordesman, *Estimates of Chinese Military Spending*, 2016). Tiongkok juga tidak memasukkan bidang-bidang yang berkaitan ke dalam rancangan anggaran pertahanannya, seperti pengeluaran untuk personel kepolisian Tiongkok, pengeluaran keperluan sebagian program penelitian dan pengembangan, pembelian persenjataan dari luar negeri, hingga kontribusi PLA dalam program antariksa

Tiongkok (Liff & Erickson, 2013). Sehingga anggaran yang sebenarnya dimungkinkan lebih besar dari angka yang dilaporkan secara resmi.

Anggaran pertahanan yang besar membuat Tiongkok mampu memodernisasi angkatan bersenjata secara keseluruhan. Tidak hanya pesawat siluman, Tiongkok menginvestasikan sebagian besar anggarannya untuk memperoleh teknologi-teknologi canggih seperti kapal induk, kapal selam bertenaga nuklir, rudal balistik, hingga kecerdasan buatan (Lee, 2019).

Angkatan bersenjata Tiongkok, khususnya angkatan lautnya, hingga saat ini baru diperkuat melalui kepemilikan satu unit kapal induk bernama *Liaoning*. Akan tetapi, per April 2017 Tiongkok dikabarkan tengah membangun dua unit kapal induk lainnya, dengan satu unit di antaranya dirancang dengan spesifikasi yang berbeda (GlobalSecurity.org, 2019). *Liaoning* merupakan kapal induk pertama Tiongkok yang sebelumnya dimiliki angkatan laut Ukraina. Pembelian *Liaoning* mengakhiri pergolakan panjang di antara petinggi PLA dalam memandang signifikansi kapal induk dalam pertahanan Tiongkok (Scobell, McMahon, & Cortez, 2015).

Proses hingga *Liaoning* dioperasikan tidak jauh rumitnya dengan proses hingga ke tahapan pembelian itu sendiri (Scobell, McMahon, & Cortez, 2015). Setelah dibeli dari Ukraina seharga USD 20 juta, butuh waktu kurang lebih empat tahun hingga kapal ini tiba di kota Dalian, bagian timur laut Tiongkok, untuk menjalani pemasangan mesin dan instrumen lainnya serta masa uji coba. Pada tanggal 25 September 2012, *Liaoning* resmi dioperasikan oleh angkatan laut Tiongkok.

Sistem penggerak pada kapal *Liaoning* tidak menggunakan tenaga nuklir, seperti yang digunakan oleh kapal induk AS, melainkan dengan mesin berbahan bakar

diesel. Dilihat secara performa, *Liaoning* tidak dapat beroperasi dengan maksimal dalam jangka waktu panjang. Oleh karenanya *Liaoning* lebih sering dioperasikan sebagai kapal latih sekaligus membantu Tiongkok dalam pengembangan sistem persenjataan kapal induk lainnya. Salah satunya adalah pesawat tempur J-15 yang khusus digunakan dari kapal induk. Untuk kapasitas angkutnya, *Liaoning* dapat mengangkut sebanyak 36 unit pesawat dan helikopter—pesawat tempur J-15, helikopter peringatan dini Z-18J dan helikopter anti kapal selam Z-18F, serta helikopter SAR Z-9—serta 5.000 awak.

*Liaoning* bukanlah satu-satunya kapal induk yang dimiliki Tiongkok. Setelah *Liaoning*, Tiongkok membangun dua kapal induk baru yaitu Type 001A dan Type 002. Type 001A memiliki spesifikasi serupa dengan *Liaoning*, hanya saja dengan ukuran dan kapasitas angkut yang sedikit lebih besar. Kapal Type 001A sampai sekarang berada dalam tahapan uji coba dan diperkirakan memasuki tahap operasional pada akhir tahun ini. Kapal induk yang saat ini sedang dibangun, Type 002, berbeda lagi. Perbedaan mendasar terletak pada penggunaan ketapel untuk meluncurkan pesawat, tidak seperti dua kapal induk sebelumnya yang menggunakan *ski-ramp* di bagian anjungan (O'Rourke, 2019). Penggunaan ketapel atau lazim disebut sistem CATOBAR<sup>5</sup> tidak hanya mempersingkat waktu peluncuran pesawat, namun juga kapasitas persenjataan yang dapat dibawa untuk menjalankan operasi serta mengurangi resiko kerusakan *airframe* pesawat (O'Rourke, 2019).

Selain membangun kapal induk, Tiongkok turut mengembangkan sistem persenjataan angkatan laut lainnya dengan membangun kapal selam bertenaga nuklir. Kapal selam, terutama yang menggunakan tenaga nuklir, merupakan komponen penting dalam militer sebuah negara. Tenaga nuklir memungkinkan sebuah kapal selam untuk

---

<sup>5</sup> *Catapult-Assisted Take-Off But Arrested Recovery*

berlayar dengan jarak hampir tak terhingga sekaligus menyelam dalam jangka waktu panjang. AS, Inggris, Prancis, dan Rusia menjadikan kapal selam sebagai komponen trimatra kekuatan nuklir nasionalnya. Seakan tidak ingin ketinggalan, Tiongkok mengembangkan kekuatan nuklir bawah lautnya dengan membangun kapal selam balistik nuklirnya sendiri.

Kekuatan rudal balistik Tiongkok tidak lepas dari peningkatan dan pembaruan. Tiongkok membangun dan mengerahkan rudal balistik untuk berbagai jenis keperluan dengan jarak jelajah yang bervariasi.

Modernisasi yang dilakukan angkatan bersenjata Tiongkok turut disesuaikan dengan kebijakan pertahanan yang dicanangkan pemerintah. Sesuai dengan *China's Military Strategy* yang dikeluarkan tahun 2015, tugas utama yang menjadi kewajiban angkatan bersenjata Tiongkok yaitu mengatasi segala bentuk ancaman militer dan keadaan darurat, serta melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah teritorial Tiongkok di darat, laut, maupun udara; melindungi upaya unifikasi Tiongkok dan Taiwan; melindungi keamanan dan kepentingan nasional Tiongkok dalam ranah baru; melindungi kepentingan nasional Tiongkok di luar negeri, mempertahankan kemampuan deterensi strategis dan menjalankan kemampuan penyerangan balik dengan kekuatan nuklir; ikut serta dalam kerja sama keamanan regional dan internasional, serta menjaga perdamaian regional dan dunia; memperkuat upaya dalam melawan tindakan infiltrasi, separatisme, dan terorisme demi menjaga keamanan dan stabilitas sosial politik Tiongkok, menjalankan tugas-tugas lain seperti memberikan bantuan bencana dan pertolongan darurat, fungsi perlindungan bagi anggota pemerintahan dan individu penting lainnya, serta mendukung pembangunan ekonomi dan sosial nasional.

Dokumen kebijakan pertahanan Tiongkok pertama kali dikeluarkan pada tahun 1995, dan hingga saat ini sudah

ada 11 dokumen kebijakan pertahanan yang dikeluarkan pemerintah Tiongkok. Masing-masing dokumen mengandung karakteristik kebijakan yang berbeda-beda (Yao, 2015). Untuk dokumen tahun 2015 penekanan diberikan kepada tugas dan misi yang harus dijalankan seluruh lapisan militer Tiongkok. Militer Tiongkok tidak lagi terbatas dalam menjalankan misi-misi pertahanan, akan tetapi turut menjalankan operasi-operasi ofensif selama dalam tujuan yang disebutkan sebelumnya.

## **B. Eksistensi Amerika Serikat dan India sebagai Ancaman Tiongkok di Asia**

### **1. Kebangkitan Amerika Serikat dan India sebagai Ancaman**

Tidak dapat dipungkiri bahwa Tiongkok telah mengalami perkembangan pesat dalam berbagai aspek kehidupannya saat ini. Perubahan yang dilakukan oleh Deng Xiaoping dan pemimpin selanjutnya telah membawa Tiongkok pada kebangkitannya di kancah internasional. Seiring meningkatnya posisi dan peran Tiongkok, banyak negara menaruh kekhawatiran akan potensi perubahan tatanan dunia sebagai konsekuensi dari kelahiran negara adidaya baru yang kerap kali berakhir dengan perang. Pemerintah Tiongkok menanggapi kekhawatiran tersebut melalui '*China's peaceful development*'; Tiongkok meyakinkan dunia bahwa kebangkitannya dilakukan melalui cara-cara damai dan tidak akan menimbulkan pengaruh buruk bagi dunia internasional. Akan tetapi, dalam realitanya beberapa kebijakan yang dikeluarkan Tiongkok tidak hanya menimbulkan ancaman bagi negara-negara kawasan melainkan negara-negara seperti AS dan India. Kebijakan apa saja yang dipandang memberikan ancaman bagi dunia internasional?

#### **a. Taiwan**

Negara yang terletak di tenggara Tiongkok sudah sejak lama menjadi perhatian Beijing. Setelah Chiang

Kai-sek meninggalkan Tiongkok dataran ke pulau Formosa, serangkaian upaya telah dilakukan untuk mempersatukan kembali wilayah tersebut. Krisis Selat Taiwan Pertama, Kedua, dan Ketiga membuktikan ambisi besar Beijing dalam reunifikasi Taiwan.

Sikap permusuhan terhadap Taiwan tidak hanya ditunjukkan Beijing melalui konfrontasi bersenjata. Serangkaian tindakan turut dilakukan untuk mendelegitimasi kekuasaan pemerintah Nasionalis di dunia internasional. Bersama dengan penguasaan Tiongkok Daratan oleh pemerintah komunis, Mao berjuang dengan segenap cara untuk merebut kursi keanggotaan PBB dan salah satu organnya, Dewan Keamanan, yang dipegang Taiwan waktu itu. Bukan langkah yang mudah bagi Mao untuk mencapai tujuan tersebut; mayoritas kursi Dewan Keamanan ditempati oleh AS dan sekutunya yang tentu tidak menginginkan adanya kekuatan komunis selain Soviet di dalam PBB.

Pada tahun 1961, Sidang Umum PBB mengeluarkan Resolusi 1668 terkait kemungkinan pemindahan kekuasaan di dalam PBB dan organ-organ terkait dari Taiwan menuju Tiongkok. Resolusi ini dikeluarkan mengingat perlunya langkah-langkah dari PBB untuk menyelesaikan perbedaan pandangan antara negara-negara anggota PBB yang mengakui Tiongkok atau Taiwan. Oleh karenanya, diperlukan dua pertiga suara dari seluruh negara anggota agar resolusi ini dapat diterapkan.

Selama sepuluh tahun berikutnya, upaya pemindahan kekuasaan tidak pernah berhasil dilakukan karena campur tangan AS dan sekutunya. Memasuki tahun 1971, keadaan berbalik menguntungkan Tiongkok. Pada 15 Juli 1971, negara-negara sahabat Tiongkok<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Negara-negara yang dimaksud antara lain Albania, Aljazair, Kongo, Kuba, Guinea, Irak, Mali, Mauritania, Republik Demokratik Rakyat Yaman,

mengusulkan PBB terkait pengembalian hak-hak Tiongkok sebagai perwakilan yang sah dalam PBB. Mereka beranggapan bahwa selama ini Tiongkok telah dieksklusikan eksistensinya dari dunia internasional, khususnya PBB. Pemerintah Nasionalis dipandang bukan menjadi representasi yang sah dari rakyat Cina dan posisi yang dipegang Taiwan semata-mata karena dukungan politik dan militer AS. Maka dari itu negara-negara sahabat Tiongkok mendorong PBB agar mencabut Taiwan dari posisinya di PBB (United Nations, 1974, pp. 126-127).

Pada 25 Oktober 1971, melalui Resolusi Sidang Umum 2758 PBB mengakui representasi Tiongkok melalui pemberian hak-hak yang sebelumnya dipegang Taiwan termasuk kursi keanggotaan tetap Dewan Keamanan. Bertepatan dengan keputusan tersebut, PBB turut mengeluarkan perwakilan Taipei yang berujung pada hilangnya representasi Taiwan dalam berbagai organ PBB.

Untuk mengukuhkan posisinya di dunia internasional, Beijing menerapkan '*one-China principle*'. Prinsip ini mengakui Tiongkok sebagai Cina yang sah dan kedaulatannya mencakup wilayah Hongkong, Macau, dan Taiwan. '*One-China principle*' berbeda dengan '*one-China policy*', di mana istilah yang terakhir disebutkan merujuk pada kebijakan luar negeri AS dan sejumlah negara lainnya yang tidak mengakui Taiwan secara formal (Hsieh, 2019). Adanya prinsip ini memberikan implikasi terhadap pola hubungan internasional, di mana negara-negara yang ingin menjalin hubungan dengan Tiongkok tidak diperbolehkan menjalin hubungan dengan Taiwan, begitu pun sebaliknya.

---

Romania, Somalia, Sudan, Republik Arab Suriah, Republik Bersatu Tanzania, Yaman, Yugoslavia dan Zambia.

## b. *East China Sea Air Defense Identification Zone*

Setelah Taiwan, Tiongkok lantas tidak berhenti dalam meningkatkan posisinya sebagai kekuatan baru dan menciptakan kontroversi lainnya. Ini dibuktikan manakala Tiongkok membentuk *air defense identification zone* (ADIZ) di atas perairan Laut Tiongkok Timur pada 23 November 2013.

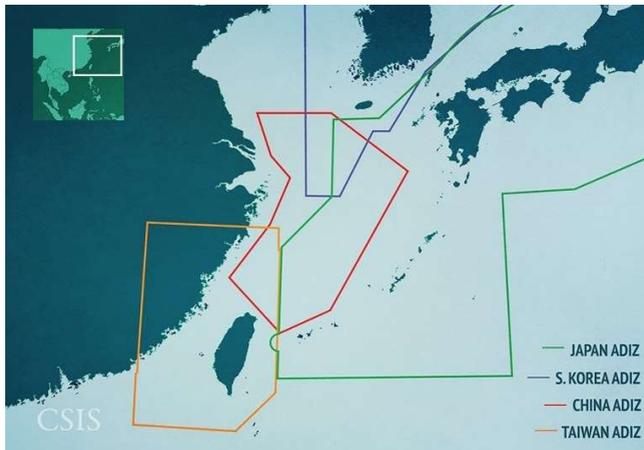
ADIZ didefinisikan sebagai sebuah kawasan tertentu dalam wilayah udara internasional yang berbatasan dengan wilayah udara teritorial suatu negara di mana negara yang bersangkutan menetapkan persyaratan identifikasi bagi pesawat asing yang akan memasuki wilayah udara teritorialnya (Burke & Cevallos, 2017). Artinya, pesawat-pesawat asing yang berada di dalam atau hendak memasuki ADIZ harus mengidentifikasi diri serta memberikan tujuan yang jelas pada negara pembentuk ADIZ. Apabila pesawat asing tersebut tidak dapat (atau tidak ingin) mengidentifikasi dirinya, maka negara bersangkutan dapat mengambil tindakan pengamanan.

Suatu negara dapat membentuk ADIZ untuk melindungi wilayah kedaulatannya dari kemungkinan agresi negara lain melalui udara. Sehingga tugas-tugas yang dijalankan ADIZ terbatas meliputi pemberitahuan, penelusuran, dan pengendalian pesawat asing sebelum memasuki wilayah udara teritorial (Bitzinger, *China's ADIZ: South China Sea Next?*, 2013). ADIZ Tiongkok di Laut Tiongkok Timur bukan yang pertama dan satu-satunya; lebih dari 20 negara telah membentuk zona identifikasi udara serupa untuk melindungi wilayah teritorialnya. Hanya saja, untuk Tiongkok kasusnya berbeda.

Dalam tulisan yang berjudul *China's ADIZ: South China Sea Next?*, Richard Bitzinger menyebutkan ADIZ yang dibentuk Tiongkok berbeda dengan ADIZ yang dibentuk negara lain. *East China Sea ADIZ*

dibentuk secara tumpang tindih dengan ADIZ yang dibentuk Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Bahkan sebagian kecil zona identifikasi udara Tiongkok dibentuk di atas wilayah Senkaku/Diayou yang dipersengketakan dengan Jepang. Selain itu Tiongkok mewajibkan seluruh pesawat sipil asing yang memasuki *East China Sea* ADIZ untuk melaporkan diri kepada otoritas berwajib, terlepas mereka akan menuju wilayah udara nasional Tiongkok atau sekadar melintas di ADIZ tersebut. Kebijakan ini juga diterapkan pada pesawat non-komersial lainnya, terutama pesawat militer, atau Tiongkok berhak melakukan tindakan defensif dengan kekuatan militer (Bitzinger, *China's ADIZ: South China Sea Next?*, 2013).

**Gambar 4.1** Peta *East China Sea Air Defense Identification Zone (ADIZ)*



Sumber: (Green, Hicks, Cooper, Schaus, & Douglas, 2017)

Pembentukan *East China Sea* ADIZ tak pelak menimbulkan kecaman dari negara-negara sekitarnya, terutama Jepang dan Korea Utara. Pemerintah Jepang merespons pembentukan *East China Sea* ADIZ dengan

mengerahkan armada udaranya untuk mencegah pesawat militer Tiongkok yang menjalankan patroli perdananya (Green, Hicks, Cooper, Schaus, & Douglas, 2017). Sedangkan Korea Selatan awalnya bersikap lebih lunak dengan berdiplomasi dengan Beijing untuk mengatur ulang zona identifikasi udaranya. Ketika permohonannya ditolak, Seoul bergerak dengan memperluas zona identifikasi udaranya (Green, Hicks, Cooper, Schaus, & Douglas, 2017).

### c. Sengketa Laut Tiongkok Selatan

Dari seluruh isu kontroversial yang melibatkan Tiongkok, sengketa Laut Tiongkok Selatan agaknya menjadi isu yang paling banyak mencuri perhatian dunia internasional. Besarnya kepentingan yang dimiliki masing-masing *claimant states*, belum termasuk kehadiran aktor eksternal, menjadikan isu ini semakin kompleks dan sulit diselesaikan (Huang & Billo, 2015).

Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah perairan dengan luas keseluruhan mencapai 3,7 juta kilometer persegi, menjadikannya sebagai salah satu laut terluas di dunia. Secara geografis Laut Tiongkok Selatan berbatasan dengan Tiongkok di sebelah utara, Taiwan dan Filipina di sebelah timur, pulau Borneo di sebelah selatan dan semenanjung Malaya di sebelah barat. Tidak hanya terdiri dari wilayah perairan, Laut Tiongkok Selatan memiliki gugus pulau karang yang jumlahnya mencapai ratusan, sebagian besar merupakan pulau tidak berpenghuni. Beberapa kepulauan yang terletak di Laut Tiongkok Selatan yaitu Kepulauan Pratas (Dongsha Islands), Kepulauan Spratly (Nansha Islands), Kepulauan Paracel (Xisha Islands), Gosong Scarborough (Huangyan Dao), dan Tepian Macclesfield.

Secara geomorfologi Kepulauan Spratly terdiri atas pulau dan terumbu karang yang jumlahnya mencapai 140 buah (Ohnesorge, 2016). Jumlah tersebut tiga

kali lebih banyak dibandingkan jumlah pulau di Kepulauan Paracel, walaupun dengan luas yang lebih sempit. Bersama dengan Gosong Scarborough, ketiga kepulauan tersebut menjadi objek yang paling dikontestasikan antar *claimant states* (Ohnesorge, 2016).

Besarnya Laut Tiongkok Selatan berbanding lurus dengan potensi kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. *Chinese National Offshore Oil Company*, perusahaan milik Tiongkok yang bergerak di bidang eksplorasi minyak menyatakan bahwa walaupun sulit menentukan jumlah pastinya, namun kandungan minyak bumi dan gas alam di Laut Tiongkok Selatan diperkirakan mencapai 125 miliar barel dan 500 triliun kaki kubik (Huang & Billo, 2015). Tentunya hal ini mampu membawa keuntungan bagi negara yang memiliki klaim atas wilayah Laut Tiongkok Selatan. Selain kandungan minyak bumi dan gas alam yang melimpah, Laut Tiongkok Selatan merupakan perairan yang kaya dengan hasil ikan dengan perkiraan hasil tangkapan tahunan mencapai 7,5 ton per kilometer persegi (Huang & Billo, 2015).

Sengketa berawal ketika presiden Chiang Kai-sek memasukkan Laut Tiongkok Selatan berikut Kepulauan Spratly dan Paracel sebagai teritorial kedaulatan Tiongkok. Awalnya kepulauan Spratly merupakan bagian dari wilayah koloni Prancis (Indochina) yang berpusat di Vietnam sejak tahun 1933 hingga penyerbuan dan pendudukan oleh Jepang pada 1940. Tindakan serupa dilakukan Prancis terhadap Kepulauan Paracel dengan mendirikan stasiun cuaca satu tahun sebelumnya (Encyclopaedia Britannica, 2013). Selama penguasaan Jepang, Kepulauan Spratly dijadikan pangkalan kapal selam militer Jepang mengingat lokasinya yang strategis (Pletcher, 2015). Berakhirnya Perang Dunia Kedua menyebabkan kedua kepulauan berpindah tangan kepada Tiongkok, terlepas dari klaim Jepang yang bertahan hingga enam tahun setelahnya.

Pada tahun 1947, pemerintah mengeluarkan peta wilayah teritorial Tiongkok yang mencakup hampir seluruh kawasan Laut Tiongkok Selatan berikut Kepulauan Spratly dan Paracel di dalamnya melalui sembilan garis putus-putus (*nine-dash line*). Peta ini menjadi cikal bakal sengketa antara Tiongkok dan Taiwan menyusul pengambilalihan wilayah Daratan oleh pemerintah komunis. Pada tahun 1951, Jepang secara resmi mencahut klaimnya atas dua kepulauan tersebut.

Situasi mulai menjadi rumit ketika Vietnam turut mengklaim sebagian wilayah Laut Tiongkok Selatan, terutama Kepulauan Spratly. Klaim yang diajukan Vietnam didasarkan pada pendudukan pemerintah Prancis sejak tahun 1933 hingga diserahkan kepada Vietnam seiring berakhirnya Perang Dunia II (Wu, 2013). Setelah Vietnam, giliran Malaysia dan Filipina yang ikut menyatakan klaimnya terhadap wilayah Laut Tiongkok Selatan. Kedua negara tersebut mendasarkan klaimnya sesuai *United Nations Conference on the Law of the Sea* (UNCLOS) III tahun 1982. Salah satu poin dalam UNCLOS III yang menjadi basis klaim Malaysia dan Filipina adalah zona ekonomi khusus (ZEE) di mana negara berhak menentukan wilayah sejauh 200 mil laut dari garis batas terluar untuk kepentingan eksplorasi dan penggunaan kandungan di dalamnya. Brunei Darussalam menjadi *claimant state* terakhir ketika pemerintah Brunei memasukkan sebagian kecil wilayah Kepulauan Spratly dalam peta wilayah teritorialnya.

## Gambar 4.2 Wilayah Klaim Masing-Masing *Claimant States* dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan



Sumber: (BBC, 2016)

Untuk meredakan sengketa, pada tahun 2002 seluruh *claimant states* yang telah bergabung dalam UNCLOS 1982 menyetujui *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*. Deklarasi ini berisi komitmen *claimant states* dalam mematuhi UNCLOS 1982 sekaligus menjadikannya sebagai landasan dalam penyelesaian sengketa (Ohnesorge, 2016). Selain itu, *claimant states* juga berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi memperkeruh situasi serta menyelesaikan sengketa melalui cara-cara damai (ASEAN, 2012).

*Declaration of Conduct 2002* merupakan keberhasilan dan kegagalan. Menjadi sebuah keberhasilan karena deklarasi ini mampu mengubah sikap Tiongkok yang awalnya menolak berunding secara multilateral

dan lebih memilih negosiasi secara bilateral (Buszynski, 2003). Akan tetapi, dalam perkembangannya deklarasi ini menjadi sebuah kegagalan dikarenakan sifat deklarasi yang tidak mengikat dan pelaksanaannya yang lemah. Ini dibuktikan dengan sikap asertif yang dipertahankan Tiongkok terhadap *claimant states* lainnya (Le, 2019).

Pada tahun 2009, seluruh *claimant states* terkecuali Tiongkok mengajukan klaim perluasan wilayah landasan kontinen melebihi 200 mil laut, terutama menyangkut wilayah Kepulauan Spratly, kepada *Commission on the Limits of the Continental Shelf* (CLCS), salah satu institusi yang dibentuk bersamaan dengan perumusan UNCLOS III (Wu, 2013).

#### d. ***Belt and Road Initiative***

*Belt and Road Initiative* (BRI), atau sebelumnya dikenal sebagai *One Belt, One Road* (OBOR) merupakan sebuah inisiasi pemerintah Tiongkok yang dibentuk pada tahun 2013. Program ini dibentuk untuk meningkatkan interdependensi ekonomi dan perdagangan negara-negara anggota BRI melalui pembangunan infrastruktur transportasi, energi hingga digital (Thussu, 2018).

Inisiasi BRI diawali dengan sebuah pidato yang disampaikan presiden Tiongkok Xi Jinping dalam sebuah acara di Kazakhstan mengenai ambisi untuk menyatukan Tiongkok dengan negara-negara Asia Tengah dan Eropa melalui jalur darat bernama *Silk Road Economic Belt*. *Silk Road Economic Belt* atau Sabuk Ekonomi Jalur Sutera merujuk pada jalur perdagangan serupa yang menghubungkan benua Asia, khususnya Tiongkok, dengan benua Eropa selama lebih dari 16 abad. Jalur ini penting karena tidak hanya menjembatani perdagangan sutera dan komoditas lainnya bagi

bangsa-bangsa Eropa, namun juga menjadi wahana pertukaran budaya dan ide-ide antara dunia Barat dan Timur (UNESCO, n.d.).

Selain membangkitkan Jalur Sutra melalui *Silk Road Economic Belt*, presiden Xi turut menginisiasi Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 (*The 21st Maritime Silk Road*) yang menghubungkan Tiongkok dengan kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika hingga Eropa melalui Laut Tiongkok Selatan dan Samudera Hindia (Kurniawan, 2016). Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 diinisiasi bersamaan dengan kunjungan Xi dalam sebuah acara di Indonesia tahun 2015 silam.

**Gambar 4.3 Peta Belt and Road Initiative (BRI)**



Ketika BRI lebih difokuskan kepada pengembangan ekonomi negara-negara partisipannya, ternyata tidak semua menanggapi kelahiran BRI sebagai sesuatu yang menguntungkan. Beberapa di antaranya bahkan menjadikan proyek BRI sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, seperti yang dilakukan India. Lalu bagaimana BRI mampu membawa ancaman bagi India?

Untuk dapat melihat respons negatif India terhadap BRI, penting untuk menelaah lebih lanjut proyek-proyek apa saja yang dibangun Tiongkok dalam

kerangka BRI. Pembangunan berbagai proyek BRI yang dilakukan Tiongkok dapat dikelompokkan ke dalam enam koridor: [1] *The New Eurasia Land Bridge Economic Corridor* yang menghubungkan kota Liyungang di provinsi Jiangsu hingga kota Rotterdam (Belanda); [2] *The China-Mongolia-Russia Economic Corridor*; [3] *China-Central Asia-West Asia Economic Corridor* yang menghubungkan provinsi Xinjiang dengan kawasan Asia Tengah (Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan) dan Asia Barat (Iran dan Turki); [4] *China-Indochina Peninsula Economic Corridor* yang menghubungkan kota Nanning dengan Singapura; [5] *China-Pakistan Economic Corridor* yang menghubungkan kota Kashgar di provinsi Xinjiang dengan Pelabuhan Gwadar di Pakistan selatan, dan [6] *Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor* yang menghubungkan kota Kunming di provinsi Yunnan dengan Kolkata (India) (Derudder, Xingjian, & Kunaka, 2018).

Dari keenam koridor tersebut, koridor kelima merupakan permasalahan yang memunculkan perhatian lebih bagi India. Penyebabnya, proyek *China-Pakistan Economic Corridor* melintasi wilayah Kashmir yang dipersengketakan dengan Pakistan. Sengketa India-Pakistan atas Kashmir sudah terjadi bersamaan dengan kemerdekaan keduanya dari persemakmuran Inggris pada tahun 1947. Adanya saling klaim kepemilikan disertai besarnya kepentingan nasional yang dimiliki India dan Pakistan seperti akses sumber daya alam dan ekonomi seringkali menyebabkan pecahnya perang seperti terjadi pada tahun 1947-1948, 1965, 1999, hingga yang terbaru pada bulan Februari silam (Snow, 2016; Singh, 2017). Kedekatan Pakistan dan Tiongkok, ditambah dengan hubungan India-Pakistan yang masih memanas dapat berdampak terhadap keberlangsungan proyek BRI—dan hubungan India-Tiongkok secara umum.

Potensi ancaman terhadap kedaulatan dan integritas wilayah bukan satu-satunya alasan India bersikap skeptis terhadap BRI. Baruah (2018) menyebutkan kurangnya transparansi Beijing dalam implementasi BRI dan peningkatan hubungan dengan negara-negara sekitar membuat New Delhi dengan tegas menolak eksistensi BRI di kawasan Asia Selatan.

## **2. Strategi Perimbangan AS di Kawasan Asia Pasifik**

Sebelum membahas strategi perimbangan kekuatan Tiongkok yang dilakukan AS, penting untuk membahas eksistensi AS di kawasan Asia Pasifik dalam perspektif historis. Tujuannya tidak lain karena kebijakan-kebijakan AS saat ini memiliki kesamaan dengan kebijakan yang dilakukan di masa lampau.

Eksistensi AS di kawasan Asia Pasifik telah berlangsung selama tujuh dekade; diawali dengan penyerangan Jepang terhadap pangkalan militer AS di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan Jepang pada 7 Desember 1941 menyebabkan korban tewas hingga 2.300 jiwa dan 1.200 lainnya luka-luka; menjadikannya sebagai peristiwa paling mematikan dalam sejarah AS hingga serangan kelompok teroris Al-Qaeda terhadap gedung *World Trade Center* (WTC) dan objek vital AS lainnya di New York dan Washington, D.C. lebih dari setengah abad setelahnya. Sehari berselang, presiden AS Franklin D. Roosevelt dengan persetujuan Kongres mendeklarasikan perang terhadap Jepang.

Serangan Pearl Harbor, dalam sejumlah tulisan, bukan menjadi pertanda eksistensi AS di kawasan Asia Pasifik untuk yang pertama kalinya. Beberapa bulan sebelum serangan Jepang, AS secara tidak resmi telah membantu Chiang Kai-sek dalam melawan Kekaisaran Jepang melalui *American Volunteer Group* (AVG) atau *Flying Tigers*. *Flying Tigers* diinisiasi pada tahun 1941 atas prakarsa Roosevelt, dan diperkuat tidak lebih dari 200 penerbang dan 60 unit pesawat tempur (Schaller, 1976). Sampai

dilebur kembali dalam *United States Army Air Forces* (USAAF) setahun berikutnya, *Flying Tigers* berhasil men-jatuhkan lebih dari 200 pesawat musuh.

Dalam tulisan lainnya, eksistensi AS di kawasan Asia Pasifik sudah ada bersamaan keterlibatan AS dalam membantu kelompok perlawanan Filipina dalam perang melawan Spanyol, yang berakhir dengan kekalahan pihak Spanyol. Berdasarkan Perjanjian Paris (1898), Spanyol men-yepakati penyerahan Filipina bersama Puerto Riko dan Guam kepada AS. Adanya perjanjian ini juga yang mengawali era kolonialisme AS di Filipina hingga berakhir pada tahun 1946.

Berakhirnya Perang Dunia II dengan kemenangan di pihak Sekutu memberikan konsekuensi besar. Melalui *Supreme Command of Allied Powers* yang dipegang oleh Jenderal MacArthur, AS dan pasukan Sekutu melakukan pendudukan atas Jepang demi mencapai tiga tujuan: mereformasi sistem pemerintahan dan masyarakat Jepang dan menjatuhkan hukuman atas berbagai kejahatan yang dilakukannya selama perang berlangsung, menghidupkan kembali perekonomian Jepang pasca perang, dan membentuk perjanjian damai dan aliansi (Office of the Historian, n.d.). Reformasi dilakukan dalam berbagai aspek seperti pelucutan angkatan bersenjata Jepang, melarang mantan petinggi militer untuk menduduki posisi politis, hingga reformasi sistem ekonomi demi pemerataan dan menciptakan sistem ekonomi yang bebas. Semua tindakan di atas dilakukan untuk mencegah kemungkinan lahirnya militerisme Jepang. Konstitusi Jepang turut mengalami reformasi, di mana salah satu poinnya berisi penolakan Jepang dalam menggunakan kekerasan sebagai instrumen dalam menjalin hubungan internasional (Office of the Historian, n.d.).

Ancaman komunisme yang semakin meresahkan Sekutu, bersama dengan memburuknya kondisi perekonomian Jepang memaksa perubahan dalam kebijakan pendudukan Jepang. AS dan sekutunya khawatir

krisis ekonomi yang dialami Jepang akan dimanfaatkan kelompok pro komunis dan Uni Soviet untuk memperoleh simpati dari masyarakat—dan berakhir dengan jatuhnya Jepang ke dalam lingkaran pengaruh komunisme. Serangkaian kebijakan ekonomi dikeluarkan dari reformasi pajak hingga pengendalian inflasi. Pecahnya Perang Korea menciptakan peluang baru bagi kebangkitan kembali Jepang melalui penetapan Jepang sebagai pusat suplai bagi pasukan PBB yang berperang melawan Korea Utara, didukung Uni Soviet dan Tiongkok (Office of the Historian, n.d.). Perang ini turut menjustifikasi keberadaan pasukan AS di semenanjung Korea yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

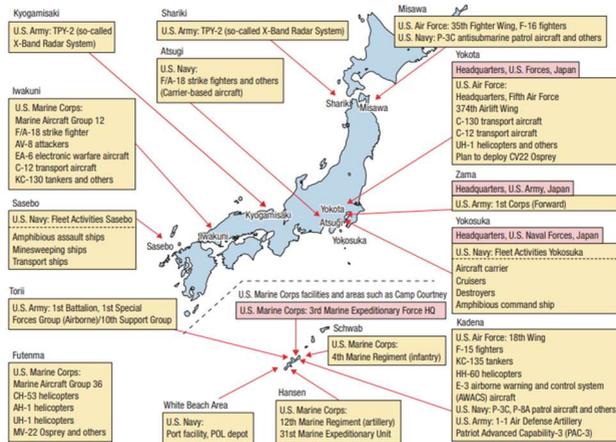
Perjanjian San Francisco (1951) resmi mengakhiri pendudukan Sekutu, akan tetapi hal tersebut bukan berarti pasukan Sekutu yang ada di sana ditarik secara keseluruhan. Melalui Perjanjian Keamanan Bersama AS-Jepang yang ditandatangani bersamaan dengan San Francisco, AS mempertahankan keberadaan pasukannya di kawasan Asia Pasifik. Keputusan AS dalam mempertahankan kekuatan militernya tidak bisa dilepaskan dari kepentingan geopolitik yang dimiliki AS. Seiring menguatnya Uni Soviet, AS perlu mencari cara dalam mencegah penyebaran komunisme agar tidak semakin meluas. Kemenangan PKT atas wilayah Daratan dan Perang Korea melahirkan apa yang disebut sebagai teori domino—ketika salah satu negara mengadopsi paham komunisme, maka negara di sekitarnya akan mengadopsi paham yang sama. AS bereaksi terhadap ancaman tersebut melalui politik pembendungan (*containment policy*)—mempertahankan perimbangan kekuatan melalui cara-cara non militer yang disertai peningkatan kekuatan militer untuk menangkal kemungkinan agresi Uni Soviet (Gerber, 2016).

Selain ancaman komunisme, eksistensi pasukan AS di Jepang turut didukung kebijakan perdana menteri Jepang saat itu, Shigeru Yoshida yang lebih menitikberatkan pembangunan ekonomi nasionalnya. Doktrin Yoshida, diambil

dari namanya, merepresentasikan kebijakan luar negeri Jepang yang disarikan pada kebijakan ekonomi. Sebagai konsekuensinya, dalam urusan keamanan dan pertahanan Jepang menyerahkannya kepada AS.

Konsekuensi ini diwujudkan melalui pembentukan Pasukan AS di Jepang atau *United States Forces Japan* (USFJ) pada tahun 1957. Pada awal pendiriannya USFJ bermarkas di Stasiun Udara Fuchu sebelum dipindahkan ke Pangkalan Udara Yokota. USFJ terdiri atas empat komponen—darat, laut, udara dan korps marinir—serta terdiri atas 54.000 personel militer berikut 42.000 anggota keluarga dan sanak famili, 8.000 pegawai sipil dari Departemen Pertahanan, dan 25.000 pekerja berkewarganegaraan Jepang (U.S. Forces, Japan, n.d.).

**Gambar 4.4 Peta Penempatan Pasukan AS di Jepang**



Sumber: (Japan Ministry of Defense, 2016)

Pada saat bersamaan AS meresmikan penempatan pasukan permanennya di Korea Selatan. Pasukan AS di Korea Selatan atau *US Forces Korea* (USFK) merupakan salah satu dari tiga komando militer yang dibentuk ketika Perang Korea berlangsung di samping komando militer PBB dan pasukan gabungan AS-Korea Selatan yang dibentuk pada

tahun 1978 (U.S. Forces, Korea, n.d.). Eksistensi USFK yang diperkuat sebanyak 23.500 personel aktif per tahun 2016 dimaksudkan sebagai implementasi kebijakan pembendungan komunisme, dan pengembangan senjata pemusnah massal yang dilakukan Korea Utara seiring keruntuhan Uni Soviet.

Isu pengembangan dan kepemilikan senjata pemusnah massal oleh Korea Utara menjadi isu yang paling menarik perhatian AS selama bertahun-tahun. Korea Utara mengawasi pengembangan senjata pemusnah massalnya melalui kerja sama riset tenaga nuklir dengan Uni Soviet selama era Kim Il Sung. Program ini membuahkan hasil dengan dibangunnya reaktor riset pertama Korea Utara dan reaktor nuklir bertenaga 5 MW di kota Yongbyon, masing-masing mulai beroperasi pada tahun 1967 dan 1986 (Challett-Avery, Manyin, Nikitin, Campbell, & Mackey, 2018). Selain nuklir, Korea Utara dilaporkan mengembangkan berbagai jenis senjata pemusnah massal lainnya seperti senjata kimia dan senjata biologis dalam kuantitas yang besar.

**Gambar 4.5 Peta Penempatan Pasukan AS di Korea Selatan**



Sumber: (Korea Herald, 2014)

Serangan terhadap gedung kembar WTC yang disertai dengan kampanye global melawan terorisme mengubah perhatian Washington. Tidak sedikit dari pasukan AS yang dipindahtugaskan ke Timur Tengah guna mendukung operasi militer AS di Afghanistan maupun Irak. Walaupun begitu, keberadaan militer di kawasan Asia Pasifik tetap dipertahankan dengan turut mempertimbangkan isu terorisme yang semakin mengglobal.

### 3. Strategi Perimbangan India di Kawasan Asia Selatan

India tentunya tidak membiarkan Tiongkok terus mengusik keamanan dan kedamaian di halaman belakangnya. Menanggapi ancaman yang ditunjukkan Beijing, New Delhi telah menyiapkan sejumlah kebijakan sebagai bentuk perimbangan kekuatan sekaligus menunjukkan posisi India sebagai pemain besar di kawasan Asia Selatan. Berbagai kebijakan yang disusun dikelompokkan ke dalam sebuah *grand strategy* yang dinamakan *Act East Policy*.

Kebijakan *Act East* pada dasarnya merupakan revisi dari kebijakan *Look East* yang diinisiasi oleh Perdana Menteri Narasimha Rao pada tahun 1991. Kebijakan ini diluncurkan setelah PM Rao melihat bahwa India mengalami berbagai jenis permasalahan yang mengurangi posisi India di mata internasional, seperti buruknya kebijakan makroekonomi yang diterapkan sehingga menciptakan kondisi fiskal yang buruk serta cadangan devisa yang rendah. Pada saat bersamaan, dalam urusan luar negeri India menjalin hubungan yang terlalu erat dengan Uni Soviet dan mengabaikan hubungan dengan negara lain, terutama di kawasan Asia (Indraswari, 2018).

Kebijakan *Look East* yang dijalankan India memiliki tiga strategi utama, yaitu untuk memperbaiki hubungan politik dengan negara di Asia khususnya negara-negara di Asia Tenggara, meningkatkan interaksi ekonomi melalui perdagangan dan investasi, serta memperkuat hubungan strategis dengan negara-negara ASEAN. Ketiga strategi tersebut diwujudkan ke dalam langkah nyata ketika India menjadi mitra sektoral pada tahun 1992, mitra dialog pada tahun 1996 dan mitra dalam tingkat KTT pada tahun 2002 (ASEAN, 2019). Bersama dengan peningkatan hubungan politik antara keduanya, hubungan ekonomi juga turut mengalami peningkatan signifikan. Mengutip tulisan Bhogal (2018) yang dimuat dalam *Observer Research Foundation*, dalam kurun waktu 1995 hingga 2016 perdagangan antara

India dengan ASEAN mengalami peningkatan sebesar 11,9%. India banyak mengimpor barang dari negara-negara ASEAN seperti Singapura, Thailand dan Malaysia dengan porsi hingga 59% dari neraca perdagangan India yang mencapai USD 65 miliar untuk tahun 2016. ASEAN juga menjadi investor terbesar bagi India dengan nilai investasi mencapai USD 19,1 miliar pada tahun 2009 (Indraswari, 2018).

Dengan semakin menguatnya pengaruh Tiongkok menjadikan India perlu mengubah prioritas kebijakannya. Hasilnya, pada pemerintahan PM Narendra Modi mengubah kebijakan *Look East* menjadi kebijakan *Act East* yang banyak dipusatkan kepada aspek militer. Upaya pertimbangan India melibatkan banyak pihak; tidak terbatas pada negara-negara Asia Tenggara melainkan hingga Asia Timur dan Pasifik Selatan. Tidak ketinggalan pula upaya-upaya yang dilakukan India dalam memperkuat hubungan pertahanan dengan negara-negara kawasan Asia Selatan.

Setelah terpilih pada tahun 2014, PM Modi mengawali masa jabatannya dengan melakukan kunjungan ke Seychelles dan Mauritius. Apa yang dilakukan PM Modi tentu bukan sekadar kunjungan biasa melainkan dapat dilihat sebagai upaya penguatan hubungan India dengan negara-negara tersebut demi menciptakan keamanan maritim di Samudera Hindia serta menjamin terpenuhinya kepentingan nasional India (Indraswari, 2018). Strategi keamanan maritim turut disiapkan dengan menekankan kerja sama multilateral. Seperti contoh, di bawah PM Modi India kembali menghidupkan kerja sama trilateral dengan Sri Lanka dan Maladewa. Kerja sama tersebut sebenarnya sudah terbentuk oleh perdana menteri sebelumnya di tahun 2011, akan tetapi tidak ada perkembangan lebih lanjut dengan alasan kurangnya perhatian dan urgensi pemerintah India dalam isu keamanan Samudera Hindia (Mohan, 2015). Melalui kerja sama India-Sri Lanka-Maladewa, penasihat keamanan nasional tiap-tiap negara dapat bertu-

kar informasi mengenai berbagai isu yang mengancam keamanan pesisir Samudera Hindia dan merumuskan alternatif penanggulangannya.

Melalui kunjungan ke Seychelles, PM Modi juga meluncurkan program pengawasan wilayah pesisir menggunakan radar. Dalam program ini, sejumlah radar ditempatkan di Mauritius, Seychelles, Sri Lanka dan Maladewa dengan tujuan memberikan gambaran dari situasi terakhir di Samudera Hindia. Seluruh data yang masuk akan diolah di pusat analisis terpadu di New Delhi; hanya saja tidak dijelaskan lebih lanjut apakah hasil analisis akan dibagikan kepada negara-negara mitra India (Mohan, 2015).